

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Dalam Upaya Pembangunan Daerah Melalui Pokok-Pokok Pikiran

* **Widya Astuti¹, Ranggi Ade Febrin²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : widya201947@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tantangan yang dihadapi DPRD Kabupaten Labuhanbatu dalam menyerap pokok-pokok pikiran untuk Pembangunan daerah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif ditemukan bahwa norma sosial, faktor personal, dan struktur organisasi berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat. Hambatan seperti ketidakpahaman tentang proses politik, kurangnya edukasi, dan dominasi partai politik mengakibatkan suara kelompok minoritas terpinggirkan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran politik dan akses informasi untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pengambilan Keputusan.

Kata Kunci: Peranan, Pokok-Pokok Pikiran, Pembangunan Daerah, Aspirasi Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstract

This study analyzes the challenges faced by the Regional House of Representatives (DPRD) of Labuhanbatu Regency in absorbing the key ideas for regional development. Using a descriptive qualitative method, it was found that social norms, personal factors, and organizational structure contribute to the low participation of the community. Barriers such as a lack of understanding of the political process, insufficient education, and the dominance of political parties have resulted in the marginalization of minority voices. The findings highlight the need for increased political awareness and access to information to encourage broader participation in decision-making.

Keywords: Role, Key Ideas or Main Thoughts, Regional Development, Community Aspiration, Regional House of Representatives (DPRD).

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak untuk meminta laporan dan informasi dari Kepala Daerah terkait pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah. Dan juga memiliki kewenangan melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan daerah. Tentunya DPRD memiliki keterlibatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program-program pembangunan lainnya. Sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik agar terwujudnya *good government*, dan juga memiliki responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.

Pada pembangunan daerah tentu jalan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam upaya pembangunan daerah, jalan yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Dalam segi ekonomi juga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah dengan berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lalu membantu mengintegrasikan wilayah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan pemerataan pembangunan.

Dengan akses yang lebih baik, masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik, termasuk peningkatan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Kemudian UMKM yang berkembang akan membuka lowongan pekerjaan kepada masyarakat sehingga dapat menimalisir tingkat kemiskinan yang ada di daerah.

Jalan yang baik juga mendukung pembangunan infrastruktur lain, seperti jembatan, pelabuhan, dan terminal transportasi, yang semuanya penting untuk mendukung mobilitas dan perdagangan. Pada tahun 2023, panjang jalan di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan provinsi secara berturut-turut sepanjang 1.217,00 km dan 141,50 km. Menurut jenis permukaannya, jalan kabupaten yang telah beraspal sebesar 905,01 km, berkerikil sebesar 458,22 km yang masih tanah sebesar 38,58 km, dan lainnya sebesar 0,6 km. Dari total tersebut 52,23 persen berkategori baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2023 peningkatan jalan yang berkategori baik berkisar 9,89 persen.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas dalam upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan efektif. Dalam upaya pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu tentunya harus dibarengi dengan peningkatan dibidang yang lainnya tidak hanya di transportasi saja. Maka dari itu, diperlukannya aspirasi dari masyarakat hal-hal apa saja yang harus ditingkatkan kedepannya.

Aspirasi-aspirasi masyarakat inilah yang ditampung oleh anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu dan terbentuklah pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran merupakan rangkuman atau inti dari suatu ide, pandangan, atau kebijakan yang diusulkan oleh individu atau lembaga, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pokok-pokok pikiran berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat yang harus diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pokok-pokok pikiran dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) memiliki hubungan yang erat dalam konteks perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu. Proses penyusunan RKPD harus memperhatikan pokok agar program-program yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Ini juga membantu memastikan bahwa alokasi anggaran tepat sasaran. Setelah pelaksanaan RKPD, evaluasi terhadap program yang dilaksanakan dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan pokok di tahun berikutnya. Maka dari itu, pokok menjadi input penting dalam penyusunan RKPD, yang memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pokok Pikiran merupakan wujud dari kedaulatan warga untuk melakukan kontrol terhadap lembaga/organisasi yang sebelumnya telah diberikan amanah oleh warga. Pokok-pokok pikiran ini berpengaruh besar dalam upaya pembangunan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Pokok-pokok pikiran menjadi penting dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan, karena membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moloeng Lexy J. (2004:24) pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata bahasa.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono,2016). Analisis data penelitian adalah pengelolaan data yang diperoleh dengan menggunakan aturan-aturan yang ada, sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yaitu suatu penilaian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum dan pengambilan kesimpulan berdasarkan pemikiran dan perkiraan logis atau dasar yang diperoleh, terutama untuk mengetahui bagaimana gambaran umum tentang Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dan Perkembangan Trans Metro Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Tidak ada yang nama peranan tanpa kedudukan, dan tidak ada kedudukan tanpa peranan. Peranan ini sangat penting dikarenakan ia dapat mengatur perilaku seseorang. Dengan peranan ini dapat menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dan dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Seseorang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.yang murah sehingga dapat terjangkau dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki beberapa fungsi penting dalam pemerintahan daerah, yaitu:

1. **Legislasi:** DPRD berperan dalam merumuskan, membahas, dan mengesahkan peraturan daerah (Perda) yang diperlukan untuk pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah.

2. Anggaran: DPRD bertugas untuk membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ini termasuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.
3. Pengawasan: DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah. Mereka memantau agar program-program berjalan sesuai dengan rencana dan bertanggung jawab.
4. Representasi: Anggota DPRD mewakili suara dan aspirasi masyarakat di daerah mereka. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah, menyampaikan kepentingan masyarakat kepada pengambil keputusan.
5. Advokasi dan Mediasi: DPRD dapat berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, termasuk melakukan mediasi antara masyarakat dan pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan pengembangan daerah. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, DPRD berkontribusi untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

1. Norma Sosial

Norma sosial adalah pedoman atau aturan yang dipegang masyarakat dalam berperilaku, bertujuan untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial. Dalam konteks pembangunan daerah, norma sosial sangat penting dalam membentuk interaksi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. DPRD Kabupaten Labuhanbatu perlu memperhatikan norma-norma sosial saat merumuskan pokok-pokok pikiran. Norma sosial adalah pengertian umum yang seragam mengenai cara-cara tingkah laku yang patut dilakukan oleh anggota kelompok ketika berhadapan dengan situasi yang berkaitan dengan kehidupan kelompok (Sheriff 2001:179).

Norma sosial mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan. DPRD diharapkan mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka. Dengan mempertimbangkan norma sosial, DPRD dapat memastikan pokok-pokok pikiran yang diusulkan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kabupaten Labuhanbatu memiliki berbagai budaya dan sosial, DPRD harus menghormati norma yang ada di berbagai kelompok masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan dapat diterima oleh semua lapisan. Norma sosial juga melibatkan sanksi bagi individu atau kelompok yang melanggar aturan. DPRD perlu menyadari bahwa kebijakan yang tidak sesuai dengan norma sosial dapat menghadapi penolakan dari masyarakat, yang bisa menghambat pembangunan.

DPRD harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dan kesesuaiannya dengan norma sosial. Ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga diterima oleh masyarakat. Norma sosial memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Dengan memahami dan menghormati norma yang ada, DPRD dapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang lebih relevan dan efektif untuk pembangunan daerah. Hal ini akan menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta mendukung keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

a. Mekanisme Pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu melakukan kegiatan pengumpulan aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran, seperti reses, dialog publik,

dan forum-forum diskusi. Ini bertujuan untuk mendengar langsung kebutuhan dan harapan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu berkoordinasi dengan pemerintah daerah (eksekutif) untuk memastikan bahwa pokok-pokok pikiran dapat diintegrasikan ke dalam program kerja pemerintah. Ini penting agar ada sinergi antara legislatif dan eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang diusulkan berdasarkan pokok-pokok pikiran. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak program terhadap masyarakat.

Hasil pelaksanaan pokok-pokok pikiran dilaporkan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Ini mencakup informasi mengenai informasi mengenai pencapaian, kendala, dan langkah-langkah perbaikan yang diambil.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan mekanisme penganggaran dan perencanaan daerah yang mencakup peran DPRD dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, PP Nomor 12 Tahun 2019 menjadi landasan hukum yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, memastikan pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel di tingkat daerah.

Peneliti menyimpulkan meskipun ada rasa puas, ada harapan agar lebih banyak orang dapat terlibat dalam proses ini, sehingga aspirasi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Ada keinginan dari masyarakat agar usulan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat, serta adanya transparansi terkait tindak lanjut tersebut, agar tidak hanya menjadi formalitas.

Kegiatan reses dipandang sebagai sarana yang efektif untuk berbicara langsung dengan anggota DPRD. Namun, ada saran agar informasi tentang tindak lanjut usulan lebih jelas disampaikan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, masyarakat menghargai upaya DPRD dalam mengelola aspirasi, tetapi ada harapan untuk peningkatan dalam hal respons dan transparansi.

b. Tindak Lanjut Pokok-Pokok Pikiran

Tindak lanjut terhadap pokok-pokok pikiran yang dihasilkan dari kegiatan reses dan pertemuan langsung sangat krusial untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat diwujudkan. Setelah aspirasi dicatat dan dibawa ke rapat paripurna, langkah selanjutnya adalah menyusun kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu perlu menetapkan jadwal yang jelas untuk menindaklanjuti setiap usulan dan mengkomunikasikan proses serta hasilnya kepada masyarakat. Keterbukaan dalam setiap tahap ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai perkembangan tindak lanjut, kepercayaan publik dapat ditingkatkan. Selain itu, partisipasi masyarakat harus terus didorong agar aspirasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka. Dengan langkah-langkah ini, pokok-pokok pikiran tidak hanya akan menjadi formalitas, tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan yang lebih responsif dan inklusif.

Maka dapat disimpulkan bahwa Masyarakat merasa DPRD cukup responsif terhadap usulan yang disampaikan, dan mereka merasakan perhatian saat ada tindak lanjut. Ada harapan dari masyarakat agar DPRD memberikan informasi lebih jelas mengenai progres pengolahan usulan, termasuk update status yang lebih rutin. Secara

umum, masyarakat merasa senang ketika aspirasi mereka ditindaklanjuti, meskipun ada yang merasa kurang transparan dalam prosesnya. Masyarakat menginginkan umpan balik yang jelas dan adanya forum atau mekanisme resmi untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan informasi yang lebih detail tentang proses usulan

Peneliti menyimpulkan tindak lanjut pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu memiliki interaksi yang baik di tingkat komunitas, di mana masyarakat berdiskusi tentang aspirasi mereka dan merasa pendapat mereka didengar. Beberapa anggota masyarakat masih merasa kurangnya transparansi dalam proses tindak lanjut usulan mereka, yang menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi. Ada kesadaran di kalangan masyarakat akan pentingnya komunikasi yang lebih aktif dari DPRD, agar mereka tidak merasa diabaikan. Masyarakat menunjukkan keinginan untuk adanya forum resmi yang bisa digunakan untuk memberikan umpan balik, memperkuat hubungan antara DPRD dan masyarakat.

c. Hubungan Legislatif Dengan Pemerintah Kabupaten

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berfungsi dalam merancang dan menyetujui anggaran daerah (APBD) yang diajukan oleh pemerintah daerah. Proses ini melibatkan diskusi antara DPRD dan eksekutif untuk memastikan anggaran mencerminkan kebutuhan masyarakat. DPRD memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan program dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Melalui mekanisme ini, DPRD Kabupaten Labuhanbatu dapat menilai kinerja pemerintah dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran. DPRD Kabupaten Labuhanbatu bertindak sebagai wakil masyarakat dengan menampung dan menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah daerah.

Hubungan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan harapan masyarakat. Kerja sama antara DPRD Kabupaten Labuhanbatu dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan responsif. Pertemuan rutin dan forum musyawarah, seperti musrenbang, menjadi sarana untuk meningkatkan sinergi antara kedua pihak.

Hubungan antara legislatif (DPRD) dan pemerintah daerah bersifat kolaboratif dan saling mendukung, dengan fokus pada perencanaan, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Keterlibatan aktif kedua pihak sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efektif.

Peneliti menyimpulkan bahwa adanya perbaikan kualitas jalan dan jembatan yang meningkatkan mobilitas. Masyarakat merasa bahwa program-program sosial kini lebih tepat sasaran, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Warga merasakan proses penganggaran yang lebih transparan, sehingga dapat melihat alokasi dana untuk proyek-proyek. Banyak warga merasa lebih terlibat dalam pengambilan keputusan, berkat komunikasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan adanya pengadaan fasilitas umum, seperti penyediaan air bersih, yang sangat dibutuhkan masyarakat. Terlihat bahwa kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah telah membawa perubahan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki wewenang untuk merumuskan dan mengesahkan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Proses ini melibatkan konsultasi dengan eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat

dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Personal

Keterlibatan sosial dan politik penulis menjadi kunci, di mana pengalaman langsung dalam kegiatan masyarakat dan partisipasi dalam forum yang melibatkan DPRD dapat menciptakan perspektif yang lebih kaya. Selanjutnya, penggunaan metodologi penelitian seperti wawancara mendalam dan observasi lapangan memungkinkan penulis untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam, menjadikan hasil penelitian lebih valid.

Kepribadian adalah organisasi dinamik dari sistem-sistem psikologis dalam individu yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungannya. Allport juga menekankan bahwa setiap individu memiliki kombinasi unik dari sifat-sifat kepribadian yang memengaruhi perilaku mereka. (Allport 2000:157).

Refleksi dan pemahaman pribadi juga sangat krusial. Melalui refleksi, penulis dapat menyampaikan bagaimana pandangannya terhadap peran DPRD berubah setelah melakukan penelitian, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, motivasi dan tujuan penelitian harus jelas, di mana penulis mencantumkan alasan memilih topik ini dan bagaimana penelitian ini berkontribusi pada pemahaman isu-isu lokal.

Dalam hal penerapan hasil penelitian, penulis dapat menyampaikan rencana aksi untuk menerapkan wawasan yang diperoleh ke dalam aktivitas sosial, menunjukkan komitmen untuk terlibat dalam proses pembangunan. Terakhir, keterkaitan dengan nilai dan keyakinan pribadi penulis memberikan dimensi tambahan, menegaskan bahwa nilai-nilai seperti keadilan sosial dan keberlanjutan sejalan dengan tujuan pembangunan daerah.

Dengan menjelaskan indikator-indikator ini secara menyeluruh, skripsi dapat memberikan narasi yang lebih kuat dan bernilai, menciptakan hubungan yang jelas antara teori dan praktik dalam konteks peranan DPRD Kabupaten Labuhanbatu.

a. Kepentingan Personal

Dalam keadaan seperti ini individualisme dan egoisme sektoral bermunculan menyertai perilaku yang menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi dan kelompok (Mukhlis 2005:179).

Tantangan serius dalam konteks sosial dan politik di Indonesia. Individualisme yang tinggi sering kali menyebabkan individu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kolektif, sehingga mengurangi rasa solidaritas dalam masyarakat. Sementara itu, egoisme sektoral membuat kelompok-kelompok tertentu lebih mementingkan agenda mereka sendiri, meskipun itu merugikan kelompok lain. Hal ini menciptakan konflik dan ketidakadilan sosial.

Ketika perilaku yang menghalalkan segala cara muncul, individu atau elite politik mungkin menggunakan metode yang tidak etis atau ilegal untuk mencapai tujuan mereka, berpotensi menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dapat menurun, menciptakan krisis kepercayaan dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kepentingan publik, serta memperkuat mekanisme akuntabilitas dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat luas

Warga Kabupaten Labuhanbatu berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Mereka aktif mendengarkan dan berkolaborasi dengan komunitas untuk memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Peneliti menyimpulkan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan masyarakat. Mereka cenderung berupaya untuk menyampaikan aspirasi yang mencerminkan kebutuhan dan harapan komunitas. Diskusi dan kolaborasi dengan orang lain menjadi praktik umum dalam mengajukan aspirasi, menunjukkan bahwa masyarakat berusaha untuk mewakili suara kolektif. Selain itu, transparansi dalam menjelaskan aspirasi juga diutamakan, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai adil dan inklusif.

b. Kepentingan Partai

Kepentingan partai politik memainkan peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan di DPRD. Setiap partai memiliki agenda dan visi yang ingin dicapai, yang sering kali mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal ini dapat memengaruhi arah kebijakan dan prioritas yang diambil oleh anggota DPRD.

Partai politik harus menjadi mediator antara kepentingan individu dan kolektif untuk mencapai kepentingan publik (Prasojo:2014). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan kepentingan partai, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan akan membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan partai dan kepentingan publik.

Di satu sisi, kepentingan partai dapat memperkuat stabilitas politik dan memfasilitasi pembuatan keputusan yang lebih terorganisir. Namun, di sisi lain, dominasi kepentingan partai tertentu dapat mengakibatkan pengabaian terhadap suara kelompok minoritas dan masyarakat yang kurang terwakili.

Komitmen masyarakat Kabupaten Labuhanbatu untuk memastikan bahwa kepentingan publik selalu diutamakan. Mereka menuntut agar wakil rakyat mendengarkan aspirasi masyarakat dan berani mengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan rakyat demi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menyimpulkan bahwa terlihat bahwa masyarakat Kabupaten Labuhanbatu memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan partai. Mereka berharap wakil rakyat bertanggung jawab kepada masyarakat dan berani mengambil sikap yang adil, terutama dalam situasi konflik. Dialog terbuka dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi poin penting yang ditekankan, menunjukkan bahwa mereka menginginkan transparansi dan keterlibatan dalam proses demokrasi.

c. Kapasitas Partai

Pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan sistem kepartaian yang stabil, yang krusial bagi stabilitas pemerintahan, terutama di negara yang sedang berkembang. Stabilitas atau instabilitas pemerintahan sangat terkait dengan kokohnya partai politik yang ada. Partai politik yang kuat, dengan struktur organisasi yang baik dan kaderisasi yang efektif, mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengurangi ketegangan sosial. Kinerja sistem kepartaian juga bergantung pada mekanisme yang

memastikan partai dapat berfungsi dengan baik, seperti sistem pemilihan yang adil dan dukungan finansial yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan partai politik, sehingga dapat mendukung stabilitas politik dan sosial.

Masyarakat berharap adanya dorongan untuk berinovasi serta memanfaatkan teknologi mencerminkan harapan masyarakat agar partai dapat lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan keterlibatan yang lebih besar dalam proses politik dan pengambilan keputusan, demi kesejahteraan bersama. Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu menginginkan partai politik yang lebih responsif, transparan, dan relevan dengan kebutuhan publik. Mereka menuntut peningkatan dalam pendidikan politik, komunikasi, dan penguatan sistem internal.

3. Struktur

Struktur merujuk pada cara menyusun variabel dalam penelitian. Ini termasuk pembagian antara variabel independen (yang mempengaruhi) dan variabel dependen (yang dipengaruhi). Misalnya, dalam studi tentang peran DPRD, variabel independen dapat berupa kebijakan yang diusulkan, sedangkan variabel dependen adalah tingkat pembangunan daerah. Struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok dalam struktur tersebut (Soerjono Soekanto 2007:127).

Struktur juga menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Ini bisa berupa interaksi sebab-akibat, di mana satu variabel memengaruhi yang lain. Contohnya, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat (variabel independen) dapat memengaruhi efektivitas kebijakan DPRD (variabel dependen). Struktur variabel sering kali disajikan dalam bentuk model atau diagram yang menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Ini memudahkan visualisasi interaksi setiap variabel dan mendukung hipotesis penelitian.

Struktur juga mencakup kerangka teoritis yang menjadi dasar penelitian. Ini menjelaskan konsep-konsep utama dan bagaimana konsep tersebut saling berhubungan, memberikan konteks bagi variabel yang diteliti.

Setiap variabel dapat memiliki beberapa indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Struktur mencakup identifikasi indikator-indikator tersebut serta bagaimana mereka berhubungan dengan variabel yang lebih besar. Memahami struktur pada konsep variabel memungkinkan penulis skripsi untuk merancang penelitian yang lebih sistematis dan fokus. Ini membantu menjelaskan dan menganalisis hubungan antar variabel, yang pada akhirnya meningkatkan pemahaman tentang topik yang diteliti.

a. Seberapa Banyak Pokok-Pokok Pikiran Yang Diusulkan di Daerah Pilihan

Masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterikatan satu sama lain, di mana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan bersifat berkelanjutan (soekanto 2007:231).

Masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterikatan antar anggotanya, di mana berbagai pola tingkah laku khas berfungsi sebagai pengikat dalam satu kesatuan manusia. Dalam konteks ini, interaksi sosial yang terjadi di antara individu menciptakan kebudayaan, yang mencakup nilai, norma, dan tradisi yang menjadi identitas bersama. Keterikatan ini penting untuk membangun rasa kebersamaan dan solidaritas, yang menjaga stabilitas sosial. Pola tingkah laku yang berkembang dalam masyarakat mencerminkan keunikan dan karakteristiknya, sekaligus

berfungsi untuk menjaga keharmonisan dalam interaksi. Proses ini bersifat berkelanjutan, di mana nilai dan norma diwariskan dari generasi ke generasi, memastikan bahwa meskipun terdapat perbedaan individu, mereka tetap terikat dalam satu kerangka sosial yang saling mendukung.

Tabel I
Jumlah Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

NO	FRAKSI PARTAI	JUMLAH POKOK-POKOK PIKIRAN 2024
1.	Golkar	25
2.	Berkarya	2
3.	Gerindra	32
4.	Hanura	13
5.	Nasdem	18
6.	PDIP	11
7.	Perindo	13
8.	PKB	3
9.	PAN	11
10.	PBB	6
11.	P3	5
12.	Total	139

Menurut observasi peneliti, inisiatif untuk ruang terbuka hijau mencerminkan keinginan masyarakat untuk lingkungan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan berharap DPRD dapat merealisasikan program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan di daerah tersebut. Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu sangat peduli terhadap berbagai isu penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ada kesadaran yang kuat akan kebutuhan akan perbaikan di sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pertanian

b. Struktur Sosial Daerah Pilihan

Struktur sosial di daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mencakup berbagai elemen yang memengaruhi dinamika politik dan sosial. Keluarga sebagai unit sosial dasar sangat berperan dalam mempengaruhi pandangan politik dan pilihan pemilih. keluarga sering kali menentukan pola dukungan terhadap calon atau partai tertentu.

Struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial serta peranan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang ada di dalam struktur tersebut. Atau, struktur sosial adalah hubungan antara posisi dan peran yang dimiliki individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini berarti struktur sosial adalah cara pengelompokan masyarakat berdasarkan peran masing-masing (Soekanto 2007:267).

Karakteristik demografis, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang etnis, memainkan peran penting dalam menentukan preferensi politik dan partisipasi pemilih. Struktur ekonomi masyarakat, termasuk tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan, memengaruhi kepentingan politik. Misalnya, petani, buruh, dan pengusaha memiliki kebutuhan dan aspirasi yang berbeda.

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kesadaran politik. Masyarakat yang lebih terdidik cenderung lebih aktif dalam proses politik dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu publik. Faktor agama dan budaya dapat memengaruhi nilai-nilai dan norma-norma yang dianut masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi pilihan politik. Berbagai organisasi, seperti kelompok tani, organisasi pemuda, dan lembaga keagamaan, berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya dapat bervariasi. Kesadaran dan motivasi untuk berpartisipasi sering kali dipengaruhi oleh informasi yang diterima.

Peran media lokal dalam menyampaikan informasi tentang calon, program, dan isu-isu penting dapat memengaruhi opini publik dan pilihan pemilih. Struktur sosial di daerah pilihan DPRD mencerminkan kompleksitas hubungan antarindividu dan kelompok yang saling berinteraksi. Memahami struktur ini penting untuk merancang kebijakan yang responsif dan efektif, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Hal ini juga membantu dalam menciptakan representasi yang lebih adil dan memenuhi aspirasi publik.

Pada hasil Observasi peneliti, menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Labuhanbatu memiliki keinginan yang kuat untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Mereka menyadari perlunya komunikasi yang lebih baik dengan DPRD dan menekankan pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda. Selain itu, mereka juga menunjukkan minat pada penggunaan teknologi dan media sosial untuk meningkatkan akses informasi. Rekomendasi yang muncul dari wawancara mencakup penguatan dialog, peningkatan keterlibatan pemuda, pemanfaatan media sosial, dan konsultasi publik, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan partisipatif.

Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan sejumlah saran untuk meningkatkan partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di DPRD. Ibu Sumarti menyarankan pentingnya forum terbuka untuk dialog langsung antara DPRD dan masyarakat. Dimas menekankan perlunya melibatkan pemuda dalam kegiatan politik untuk meningkatkan kesadaran akan partisipasi politik. Ibu Sulastri mengusulkan pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan DPRD. Adpin berharap adanya program edukasi politik di sekolah-sekolah untuk membangun minat generasi muda terhadap demokrasi. Terakhir, Rani menyarankan diadakannya konsultasi publik sebelum pengambilan keputusan untuk memberi kesempatan masyarakat berpartisipasi langsung.

Hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Upaya Pembangunan Daerah Melalui Pokok-Pokok Pikiran adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah, memperkuat dialog antar kelompok, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan asas keadilan dan kebutuhan yang nyata, tantangan-tantangan ini dapat diatasi.

Masyarakat mungkin tidak menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan. Sebagian masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang memadai untuk menyampaikan aspirasi, baik karena kendala geografis maupun keterbatasan teknologi.

Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di DPRD, perlu ada upaya untuk mengatasi norma-norma yang menghambat. Edukasi, peningkatan akses informasi, dan promosi

dialog terbuka adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan partisipatif.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Upaya Pembangunan Daerah Melalui Pokok-Pokok Pikiran maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Norma sosial yang berlaku di masyarakat sering kali membatasi partisipasi politik. Ada kecenderungan untuk menghormati hierarki dan menghindari konfrontasi dalam diskusi politik, yang mengakibatkan kurangnya suara dari kelompok-kelompok tertentu, terutama minoritas.
2. Tingkat kesadaran dan pengetahuan individu mengenai hak-hak politik mereka juga mempengaruhi keterlibatan. Banyak individu merasa tidak memiliki kapasitas atau pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi, sehingga hal ini menjadi penghambat bagi mereka untuk terlibat aktif.
3. Struktur organisasi dan prosedur di dalam DPRD dapat menjadi penghalang bagi partisipasi masyarakat. Proses yang tidak transparan dan kurangnya akses ke informasi membuat masyarakat merasa terasing dari proses politik, yang berdampak pada rendahnya partisipasi mereka.
4. Beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi kurangnya edukasi politik, keterbatasan akses informasi, dan dominasi partai politik yang mengesampingkan aspirasi masyarakat. Ketidapahaman tentang proses politik dan hak-hak yang dimiliki juga berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di DPRD, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menunjukkan keinginan untuk terlibat lebih aktif melalui forum terbuka, penggunaan media sosial, dan program edukasi politik. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di DPRD, diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang diidentifikasi berdasarkan norma sosial, personal, struktur, dan faktor penghambat. Edukasi politik, peningkatan transparansi, dan penciptaan ruang dialog yang inklusif akan sangat penting dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Prabu. 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, Onong Uchjana. (2011). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jimly, Assiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada Mangkunegara.

- Ludlow, R. & Panton, F. (1996). *The Essence of Effective Communication (Komunikasi Efektif) (terjemahan Deddy Jacobus)*. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad, Arni. (2011). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moloeng Lexy J, 2004. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernology : Ilmu Pemerintahan 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology : Ilmu Pemerintahan 2*. Jakarta : Rineka Cipta
- Rivai, Veithzal. (2008). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Syafiie, Inu Kencana. 2022. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi aksara..
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosisologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Paeni, Mukhlis. 2005. *Bunga Rampai Budaya Berpikir Positif Suku-Suku Bangsa*. Jakarta:Departemen Kebudayaan Pariwisata RI.
- Pitkin, Hanna Fenichel. 2004. "Representation and Democracy: Uneasy Alliance". in *Scandinavian Political*. Yogyakarta: Andi.
- Prasojo, E. 2014. *Politik dan Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- The Liang Gie. 2000. *Pertumbuhan pemerintahan daerah di Negara Republik Indonesia Jilid III*. Jakarta:Gunung Agung.
- Laksamana, E. (2022). Peranan DPRD dalam pembangunan daerah melalui pokok-pokok pikiran DPRD sebagai upaya pembangunan pada tahun anggaran 2021 di Kalimantan Barat (Studi Menurut Permendagri No 86 Tahun 2017 di DPRD Provinsi Kalimantan Barat). 86. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Lombo, Meigel Rio M. 2016. "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah Amandemen UUD 1945". Dalam *lex et Societatis*, Vol. IV/No. /Feb/2016/Edisi Khusus.
- Moento, P. A., Firman, F., & Yusuf, A. P. (2019). Good Governance Dalam Pemerintahan. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2), 10–16. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>
- Ranggi Ade Febrina. 2016. Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*. Vol. 2 (1). Hal 200-208
- Sinaga, S. D. H. (2021). Pengaruh Penerapan E-planning Terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhan Batu. 86, 1–38. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5527>